



# Buletin Parlementaria

Nomor 1198/II/V/2022 • Mei 2022



## Ketua DPR Resmikan Penataan Kawasan Gunung Kemukus



3 Sufmi Dasco  
Dukung Penerapan  
WFH Sepekan Guna  
Urai Kemacetan  
Arus Balik



6 Rachmat Gobel:  
Pembangunan  
Bendungan Bulango Ulu  
Bisa Perkuat Pangan  
Gorontalo



9 772614 339005



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat meresmikan penataan Kawasan Gunung Kemukus. Foto: Gerald/nvl

# Ketua DPR Penataan Kawasan Gunung Kemukus

**K**etua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meresmikan penataan Kawasan Gunung Kemukus yang berada di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (27/4). Hadir pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi. Kawasan wisata Gunung Kemukus ditata oleh Pemerintah sejak Oktober 2020 hingga rampung pada akhir 2021.

“Salah satu ciri daerah yang maju adalah memiliki ikon pariwisata. Di Jakarta ada Monas, di Medan ada Istana Maimun, di Manado ada Bunaken, dan banyak lagi daerah dengan ikonnya masing-masing,” kata Puan kawasan Gunung Kemukus, Kecamatan Sumber Lawang, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (27/4).

Puan pun mengaku senang dapat hadir di Sragen. “Karena itu saya senang dapat hadir hari ini di Sragen dalam peresmian penataan Kawasan Gunung Kemukus yang InsyaAllah akan menjadi ikon baru Kabupaten Sragen,” ucap mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut.

Peresmian penataan Kawasan Gunung Kemukus merupakan momen yang tepat karena sudah akan memasuki masa cuti bersama Idulfitri 1443 H yang dimulai pada 29 April-6 Mei 2022. Jumlah pengunjung kawasan wisata Gunung Kemukus nantinya juga diharapkan bisa meningkat di musim libur Lebaran ini. Dan dapat mendorong kebangkitan pariwisata Sragen dan meningkatkan perekonomian UMKM di kawasan Gunung Kemukus.

“Saya berharap ke depan, kalau ke Sragen salah satu tujuan adalah Gunung Kemukus. Jadi bisa mengubah citra Gunung Kemukus yang dulu, menjadi citra yang lebih baik. Bisa membawa berkah dan faedah bagi masyarakat Sragen dan sekitarnya,” tutur politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Selain meresmikan, Puan juga memberikan bantuan gerobak untuk sejumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kawasan objek wisata. Dengan lebih tertata dan bagusnya wajah baru pariwisata di Sragen ini diharapkan dapat menarik perhatian wisatawan dan dapat berdampak positif pada usaha yang ada disekitar tempat wisata. Semua pihak pun diharapkan turut menjaga kebersihan dengan melibatkan warga.

“Setelah diresmikan harus dijaga kebersihannya. Nyapu-nyapu ini daun-daun pohon besar siapa yang nyapu? Apa dibuat komunitas warga, itu juga bisa menjadi satu sumber penghasilan. Jangan hanya petugas dari dinas saja. Tapi warga juga bisa dilibatkan. Semoga kawasan Gunung Kemukus yang baru ini bisa menjadi tujuan wisata positif, dimana wisata religi dan wisata menjadi satu kesatuan di sini,” tutup Puan. ■ gal/sf



# Sufmi Dasco Dukung Penerapan WFH Sepekan Guna Urai Kemacetan Arus Balik

**W**akil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung kebijakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau *Work from Home* (WFH) selama sepekan bagi para pegawai pemerintah maupun swasta. Sebab, kebijakan WFH ini dinilai dapat mengurai kemacetan saat arus balik lebaran 2022. Bahkan, penerapan WFH terhadap pekerja tidak akan mempengaruhi produktivitas.

“Saya rasa WFH atau hadir fisik itu tentunya kualitasnya akan sama. Yang membedakan adalah yang mudik dalam seminggu ke depan, apabila usulan Pak Kapolri disetujui, itu tentunya halalhalal dengan teman-teman kantor mundur seminggu, tapi efektivitasnya adalah kemacetan dapat diurai,” kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/5).

Karena itu, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menilai usulan Kapolri tersebut dapat dipertimbangkan untuk kebaikan bersama. “Karena arus mudik dapat bertahap untuk balik ke Jakarta, sehingga kemacetan dapat diurai. Dan saya pikir usul Kapolri patut dipertimbangkan untuk kebaikan kita bersama,” tuturnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi saran



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Tim/rvl

kepada instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan WFH setelah momen Lebaran berakhir. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik. Menurutnya, kebijakan WFH dapat diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran yang jatuh pada 8 Mei 2022.

Pun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo senada dengan usulan tersebut. Menurut Tjahjo, kebijakan WFH itu juga bisa menjadi upaya untuk mencegah kenaikan jumlah kasus Covid-19 pasca-mudik Lebaran 2022. “WFH juga bisa jadi kesempatan untuk isoman (isolasi mandiri) agar mencegah adanya penambahan kasus Covid-19,” ujar Tjahjo. ■ rdn/sf



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**

Jr. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**PIMPINAN PELAKSANA**

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**

Wiryanan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**

Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**

M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**

Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irianidi, Surahmat Eko Budi Setiantono, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firista Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitomput, Zulrifki Mubien

**FOTOGRAFER**

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief

Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald

Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**

Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M, Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widjowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciaini, Riska Ramadhani

**INFOGRAFIS**

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,

Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# Presidensi G20, Indonesia Pegang Peran Penting Perdamaian Rusia-Ukraina



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar bertukar cenderamata dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket. Foto: Ojji/nvl

**W**akil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan Indonesia memiliki peranan penting dalam upaya perdamaian agresi yang kini sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina jelang helatan G20 pada November 2022 mendatang. Gus Muhaimin menegaskan, Indonesia yang ditetapkan memegang keketuaan Presidensi G20 sekaligus menjadi tuan rumah berada di posisi penting dalam upaya perdamaian, pemulihan ekonomi, dan kesehatan global di tengah agresi serangan militer yang kerap dilancarkan Rusia kepada Ukraina akhir-akhir ini.

Demikian disampaikan Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut usai menerima *courtesy call* Duta Besar (Dubes) Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket dalam agenda pertemuan dengan di Ruang Delegasi DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (25/4). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua MPR RI yang juga selaku Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini.

“Kepercayaan global ini tentu patut kita syukuri dan diemban dengan sepenuh hati. Sebagai Presidensi G20, Indonesia punya peran penting meminta Rusia menghentikan agresi sehingga kondisi negara Ukraina



**INDONESIA YANG DITETAPKAN MEMEGANG KEKETUAAN PRESIDENSI G20 SEKALIGUS MENJADI TUAN RUMAH BERADA DI POSISI PENTING DALAM UPAYA PERDAMAIAN, PEMULIHAN EKONOMI, DAN KESEHATAN**

dapat kembali normal serta hubungan damai. Indonesia sangat penting dalam Presidensi G20 sebagaimana pernah saya sampaikan ke Presiden dan Wakil Presiden. Pemerintah Indonesia terus menggodok pembicaraan-pembicaraan untuk mengagendakan G20 untuk penyelesaian Rusia-Ukraina,” jelas politisi PKB tersebut.

Sementara itu, Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket mengungkapkan Uni Eropa memiliki kekhawatiran yang sangat mendalam tentang situasi terkini di Ukraina. Dubes Uni Eropa mengharapkan Indonesia akan menggunakan peran istimewa sebagai Presidensi G20 tahun 2022 ini untuk menawarkan solusi perdamaian Rusia-Ukraina. Mengingat, perdamaian Rusia-Ukraina tidak hanya berdampak baik di Eropa tetapi juga bagi seluruh dunia terutama dalam pemulihan ekonomi global pasca pandemi Covid-19. ■ pun,ps/sf

# Rachmat Gobel: Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Bisa Perkuat Pangan Gorontalo



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat melakukan peninjauan pembangunan bendungan di kawasan perbukitan Gorontalo. Foto: Azka/nvl

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel meninjau pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Menurutnya bendungan ini merupakan proyek strategis nasional yang akan berdampak besar bukan hanya bagi masyarakat Gorontalo, bahkan memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional, khususnya dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Hal itu diungkapkan Gobel saat melakukan peninjauan pembangunan bendungan di kawasan perbukitan Gorontalo, Senin (25/4). Bendungan

ini mulai dibangun pada tahun 2021 dan diharapkan selesai pada 2024 mendatang. Nantinya bendungan ini akan memberikan manfaat irigasi bagi pertanian Gorontalo, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), memasok air bersih 2,2 meter kubik per detik, dan juga mengurangi banjir.

Politisi Partai NasDem ini juga mengatakan, Gorontalo harus menjadi peradaban baru yang maju dan makmur. "Bendungan ini akan menjadi bagian dari masa depan Gorontalo. Kita ingin membangun peradaban baru Gorontalo yang maju dan makmur melalui pendekatan budaya dan teknologi yang berakar pada adat-istiadat warisan leluhur," kata legislator daerah pemilihan (dapil) Gorontalo tersebut.

Saat peninjauan, Gobel mendapat laporan masih adanya pembebasan lahan yang masih terhambat. Bahkan pembebasan lahan baru mencapai 20 persen. "Sebagian besar yang belum dibebaskan justru ada di areal genangan air. Masalahnya bukan pada harga, tapi pada sengketa kepemilikan lahan. Ini harus segera ada solusi. Jangan sampai menghambat progres pembangunan bendungan ini," pesan Gobel menutup pernyataannya.

Proyek pembangunan bendungan ini akan menyerap anggaran sekitar Rp2,3 triliun. Pembangunan bendungan ini akan melibatkan sejumlah perusahaan seperti Utama Karya, Istana Karya, Brantas Abipraya, Yodya Karya, Indra Karya, maupun Bumi Karsa. ■ azk/sf

# Hardiknas, Ketua DPR Nilai Pesan Ki Hajar Dewantara ‘Setiap Rumah Bisa Jadi Sekolah’ Selalu Relevan

**K**etua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada seluruh insan pendidik dan peserta didik seluruh Indonesia. Di momen Hardiknas yang tepat jatuh pada 2 Mei, Puan menyampaikan harapan agar pendidikan Indonesia bisa semakin maju. Ia menilai kunci majunya pendidikan tak hanya ada pada pemerintah, guru atau pun siswa didik, namun seluruh elemen bangsa.

Hal ini sesuai semangat yang digaungkan bapak Pendidikan, Ki Hajar Dewantara. “Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa setiap orang bisa menjadi guru, dan setiap rumah bisa menjadi sekolah. Itu artinya pendidikan dapat dilakukan dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun,” kata Puan dalam keterangan persnya kepada **Parlementaria**, Senin (2/5).

Puan mencontohkan, orang tua di rumah juga bisa berperan mengajarkan anaknya. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, dimana sekolah dapat digelar secara daring, maka peran orang tua sangat penting bagi perkembangan anak. “Harus diingat bahwa guru pertama anak adalah oleh orangtuanya,”

kata mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.

Meski demikian, Puan menegaskan peran pemerintah tetap sangat penting guna mendorong pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia. Ia pun mengapresiasi sejumlah program pemerintah yang bisa berperan penting dalam pemerataan akses pendidikan. Salah satunya adalah program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang memberikan kesempatan bagi siswa tidak mampu untuk menyelesaikan pendidikannya sampai ke tingkat perguruan tinggi.

“Saya berharap melalui KIP ini semua generasi muda punya kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan. KIP ini wujud kehadiran negara dalam pengembangan SDM Indonesia. Saya tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak bisa menempuh pendidikan tinggi karena masalah biaya,” kata politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Puan kembali menekankan, pendidikan amat penting bagi Indonesia untuk menuju negara maju. Apalagi Indonesia saat ini sedang mengalami



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Kresno/mvl

bonus demografi, dimana mayoritas penduduknya berusia produktif. Akses terhadap pendidikan menjadi penting untuk bisa mencetak tenaga kerja yang berkualitas.

“Kita memiliki sekitar 270 juta penduduk, terbesar ke-4 di dunia. Mayoritas generasi muda yang sering disebut bonus demografi. Ini kesempatan luar biasa untuk Indonesia karena kemajuan bangsa tergantung kemajuan manusianya,” kata perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR ini. ■ sf



# DPR Akan Pertimbangkan Penundaan RUU DOB untuk Papua

**W**akil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan dari delegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP). Kunjungan ini dalam rangka penyampaian aspirasi

terkait dengan rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua. Pimpinan MRP meminta DPR untuk menunda pembahasan tiga rancangan undang-undang. Ketiga RUU itu yakni RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Dasco mengatakan, DPR RI akan mencoba mengomunikasikan dengan pihak-pihak terkait agar evaluasi otsus berjalan lancar. Dasco berjanji akan turut serta dalam memformulasikan agar semua berjalan baik dan tidak ada eskalasi yang tinggi. Lebih lanjut bahkan ia akan meminta komisi terkait yang membahas tiga RUU terkait DOB di Papua, agar mempertimbangkan pembahasannya dilakukan parsial menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi.

“Memang pada 12 April lalu, rapat paripurna DPR RI sudah mengesahkan tiga RUU DOB (daerah otonom baru) sebagai RUU usul inisiatif DPR

Wakil Ketua DPR RI  
Sufmi Dasco Ahmad.  
Foto: Oji/nvl

RI, tetapi dengan masukan MRP saya akan sampaikan pada pimpinan DPR lainnya, termasuk rekan-rekan di Komisi II agar mempertimbangkan penundaan RUU DOB sampai ada putusan MK,” papar Dasco saat menerima kunjungan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).

Sebelumnya MRP telah mengajukan uji materiil terhadap UU Otsus Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang perdana yang digelar pada Rabu (22/9/2021) secara daring, para pemohon mendalilkan norma dalam ketentuan Pasal 6 Ayat 2, Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 Ayat 3, Pasal 68A, Pasal 76, dan Pasal 77 UU Otsus Papua melanggar hak konstitusional orang asli Papua.

Di kesempatan yang sama Ketua MRP Timotius Murib meminta agar dilakukan penundaan pembahasan RUU DOB Papua sampai dengan hasil uji materi MK yang sudah enam kali

”

**PIMPINAN MRP MEMINTA DPR UNTUK MENUNDA PEMBAHASAN TIGA RANCANGAN UNDANG-UNDANG. KETIGA RUU ITU YAKNI RUU TENTANG PROVINSI PAPUA SELATAN, RUU TENTANG PROVINSI PAPUA TENGAH, DAN RUU TENTANG PROVINSI PEGUNUNGAN TENGAH.**

menjalani sidang. “Masyarakat minta supaya pemekaran itu di-pending atau ditunda, sampai dengan ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya kami menyampaikan aspirasi kepada Wakil DPR RI, karena beliau sangat merespons aspirasi yang disampaikan Majelis Rakyat Papua,” ujar Timotius. ■ eko/aha

# Yan Permenas Dorong BAKTI Intensifkan Sinergi dengan Operator Seluler

**A**nggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mendorong Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk intensif melakukan sinergi dan koordinasi dengan para operator seluler. Mengingat masih ada daerah *blank spot* yang belum tertangani oleh operator seluler BAKTI. Diharapkan daerah-daerah *blank spot* tersebut bisa segera mendapatkan akses secara cepat, karena hal ini berkaitan dengan penyebaran akses internet di Indonesia.

“Yang berikutnya lagi adalah saya pikir selain operator seluler dikoordinasikan dengan BAKTI, tapi BAKTI juga harus melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan penyediaan akses internet dari BAKTI yang sudah tersebar di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, baik itu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, kemudian Sulawesi, Maluku, dan Papua, termasuk dengan NTT dan NTB,” jelas Yan saat Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI ke Sumatera Utara, Jumat (8/4).

Lebih lanjut politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan, masih banyak daerah yang memiliki kelambanan dalam jaringan internetnya, meskipun di daerah-daerah tersebut sudah ada VSAT yang berfungsi untuk menerima dan mengirim data ke satelit, selain itu juga sudah ada *fiber optic* dan juga *radio link*, namun hal itu dirasa belum maksimal juga.

“Jadi dengan adanya evaluasi secara berkala BAKTI akan bisa

menetapkan kebijakan untuk menangani daerah-daerah yang masih lemot itu, kenapa? Karena *cost infrastructure* yang sudah dibangun selama ini itu cukup tinggi, jangan sampai tidak efektif dimanfaatkan oleh masyarakat luas,” tandas legislator dapi Papua tersebut.

Yan juga berharap, alokasi anggaran pemerintah yang sudah digunakan BAKTI untuk membangun proyek multinasional itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia, dan maksimal dalam penyediaan akses internet dan juga layanan telekomunikasi yang di-*backup* oleh BAKTI. Meskipun pada kenyataannya masih banyak daerah yang mengadakan ketidakstabilan jaringan internetnya.

Namun Yan menambahkan, untuk jangka panjang BAKTI memang harus mencari alternatif lain untuk mengatasi masalah yang timbul dari segi penyediaan satelit. Mengingat, dengan adanya penambahan satelit, maka tentunya *traffic* internetnya akan semakin berkurang, sehingga kemudian akses internet menjadi lebih cepat dan lancar.

“Dengan demikian saya pikir masyarakat juga yang memanfaatkan akses internet untuk kepentingan pelayanan publik, kepentingan pelayanan pemerintahan, pasti sangat merasa bahwa kehadiran pemerintah dengan semua infrastruktur ini benar-benar dirasakan masyarakat. Karena



Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas.  
Foto: Nadya/nvi

hari ini kita *bikin* program di semua lintas kementerian/lembaga, tetapi kalau manfaatnya itu tidak maksimal, kita buang *duit* yang besar kita lakukan *maintenance* tiap tahun tapi masyarakatnya belum merasakan apa-apa,” tutup Yan.

Berdasarkan data pembangunan BTS 4G BLU BAKTI di Provinsi Sumatera Utara, terdapat BTS Eksisting USO 2015-2020 di 40 lokasi dan rencana pembangunan BTS 4G Tahap 2 di 2022-2023 di 66 lokasi. Adapula rencana pembangunan BTS 4G oleh operator seluler terdapat lokasi pembangunan opsel di 75 lokasi, di antaranya: Tapanuli Tengah 4 lokasi, Tapanuli Selatan 15 lokasi, Mandailing Natal 46 lokasi, Padang Lawas 2 lokasi, Deli Serdang 2 lokasi, Binjai 1 lokasi, Serdang Bedagai 1 lokasi, Labuhan Batu 4 lokasi. ■ ndy/sf

# Anwar Hafid Dorong Kemendagri dan Kemenkeu Segera Benahi DID dan SIPD

**M**enanggapi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022 yang diterima Kota Sukabumi yang turun tajam dibanding tahun 2021, Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera menangani permasalahan tersebut.

“Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Walikota Sukabumi, memang (saya) sepakat pak. Kejadian ini bukan hanya terjadi di sini. Di beberapa daerah di Indonesia, ada (perolehan) DID-

nya nihil, pak. Hingga saat ini, saya pun mengikuti perkembangan DID. Kemendagri dan Kemenkeu perlu memberikan perhatian yang sangat serius,” tegas Anwar Hafid.

Pernyataan tersebut disampaikan Anwar pada saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Kota Sukabumi di Balai Kota Sukabumi, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin (18/4). Baginya, penurunan DID yang signifikan ini tidak hanya terjadi di Kota Sukabumi saja, akan tetapi juga di sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Politisi Partai

Demokrat itu, penilaian DID masih subjektif, terutama pada aspek penilaian inovasi daerah. Ia pun menyayangkan, akibat subjektivitas penilaian DID, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia kesulitan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

“Nah, ini saya kira, pekerjaan yang harus segera diselesaikan, untuk Kementerian Keuangan memberikan porsi penetapan DID yang akuntabel. Sedangkan, Kemendagri memberikan tambahan kejelasan kriteria soal aspek penilaian inovasi daerah,” jelas Anwar Hafid lebih lanjut.

Terakhir, terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia telah membayar gaji pegawai akibat SIPD yang tidak tersosialisasikan dengan masif dan efektif. Walaupun kini Indonesia menerapkan otonomi daerah, dalam beberapa praktik tata kelola administrasi pemerintahan, khususnya soal keuangan masih sentralistik.

“Saya harap permasalahan ini menjadi satu perhatian khusus. Mudah-mudahan kita bisa mendorong perubahan berupa perbaikan dan penyesuaian, ke depannya,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah tersebut. ■ ts/sf



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota Sukabumi. Foto: Saum/nvl



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan jajaran Kanwil Kemenkumham Gorontalo. Foto: Eko/nvl

# Johan Budi Tekankan Perbaikan Kinerja di Kanwil Kemenkumham Gorontalo

**D**alam Kunjungan Kerja Reses di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Gorontalo, Komisi III DPR RI memberikan perhatian pada upaya yang dilakukan Kanwil Gorontalo dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas sumber daya manusia. Serta data mengenai pelanggaran oleh petugas atau pegawai, Komisi III pun mempertanyakan bagaimana

penanganannya persoalan kepegawaian.

Usai rapat, Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengungkapkan perhatiannya pada upaya perbaikan SDM di Kanwil Gorontalo Kementerian Hukum dan HAM. “Saya *concern* pada perbaikan aparat penegak hukum khususnya aparat Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,” ujar Johan di Gorontalo, Kamis (21/4).

Untuk itu, Komisi III pun mendorong kinerja dalam sistem pelayanan publik yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Kanwil Kemenkumham di Provinsi Gorontalo, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, adil, dan profesional, serta mendukung upaya peningkatan perekonomian nasional.

Pada kesempatan pertemuan tersebut, Komisi III juga mempertanyakan upaya yang dilakukan Kanwil Gorontalo Kementerian Hukum dan HAM dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di bidang Pemasyarakatan yang masih kerap terjadi, yakni apakah ada kelebihan penghuni (*overcrowded*) di LAPAS, peredaran Narkoba di LAPAS, gangguan keamanan, dan penyelundupan barang ilegal.

Bahkan pada kesempatan rapat, Komisi III memberikan sorotan pada efektivitas kinerja Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA). Komisi III meminta data terkait pengawasan orang asing di wilayah Gorontalo. Komisi III pun mendorong agar menjalin efektivitas kerjasama yang dibangun dengan seluruh pihak dan menanyakan kendala yang masih dihadapi. ■ eko/aha

**A**growisata nanas merupakan destinasi wisata berbasis pertanian tanaman buah nanas terhampar luas sekitar kurang lebih 900 hektare. Salah satu lokasi Komoditi Hortikultura yang juga sebagai tujuan wisata alam pertanian bagi masyarakat Kota Jambi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan infrastruktur menuju agrowisata nanas perlu dibenahi dan patut dikembangkan. Pasalnya nanas yang berada di Desa Tangkit Baru dikenal sebagai salah satu keunggulan dan komoditas kebanggaan Provinsi Jambi, dan menjadi salah satu ikon di sektor pertanian daerah tersebut.

"Agrowisata nanas yang berbasis sumber daya alam potensial ini patut dikembangkan menjadi destinasi wisata sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar," ungkap Dedi saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI meninjau agrowisata nanas di Kecamatan Sei Gelam, Muaro Jambi, Jambi, Senin (18/4).

Pada kesempatan itu, perwakilan petani nanas turut menyampaikan sejumlah keluhan di antaranya infrastruktur jalan yang kurang baik, harga pupuk dan obat-obatan yang cukup tinggi, serta tidak adanya STA (Stasiun Terminal Agribisnis).

# Agrowisata Nanas Jambi Patut Dikembangkan

Menanggapi keluhan petani tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyambut baik usulan terkait adanya terminal buah untuk menghindari perbedaan harga antar petani dalam hal pemasaran. Namun ia memandang masyarakat setempat harus juga memastikan siapa yang nanti akan mengelola terminal tersebut.

"Secara prinsip permintaan terkait terminal buah itu tidak ada masalah, hanya saja yang menjadi catatan kita mohon dikuarkan dulu siapa yang akan bertanggung jawab mengelola, siapa yang akan merawat sehingga nantinya dengan dibangunnya terminal buah itu akan menambah produktifitas, sirkulasi, serta penghasilan, yang nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat para petani khususnya," ujar politisi PKS tersebut.

Hal senada juga diutarakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Syaiful Hidayat yang meminta adanya

*business plan* yang jelas terkait dengan permintaan terminal buah tersebut. "Jangan sampai begitu sudah ada terminal untuk pasar buah nanas, nantinya tidak dirawat. Maka harus jelas *business plan*nya, harus jelas siapa yang mengorganisir, harus jelas apa fungsinya, harus jelas keberlanjutan program ini," pungkas politisi PDI-Perjuangan itu.

Djarot menekankan pada prinsipnya Komisi IV DPR RI mendukung semua program yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk juga produk-produk olahan dari nanas yang ada di Desa Tangkit tersebut. "Dengan adanya terminal nanti kan sebagai tempat transis buah masuk kesitu, sehingga tidak ada lagi perang harga antar petani, harganya sudah pasti sesuai dengan kualitas nanasnya," jelas Djarot lebih lanjut. ■ tra/sf



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau agrowisata nanas di Kecamatan Sei Gelam. Foto: Tiara/rvl

# Novita Wijayanti Dorong **BBPJN** Tingkatkan Kualitas Jalan IKN



Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI meninjau Titik Nol IKN Nusantara. Foto: Puntho/nvl

**A**nggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mendorong Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur untuk semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas utamanya seperti jalan akses ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Novita, berdasarkan pengamatannya dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di IKN harus mempunyai korelasi langsung dengan kelancaran jaringan transportasi termasuk integrasi antar moda dan rencana pengembangan baik pergerakan di dalam kota maupun pergerakan konektivitas regional atau antar kota sekitar wilayah IKN.

“Meski akses menuju IKN sudah mulai terlihat progress, namun masih perlu adanya peningkatan beberapa titik jalan tol dan jalan nasional yang masih harus diperbaiki oleh Kepala

Balai BBPJN Kaltim beserta jajaran. Mengingat pembangunan infrastruktur di IKN harus mempunyai korelasi langsung dengan kelancaran jaringan transportasi termasuk kelancaran integrasi antar moda menuju IKN Nusantara,” ujar Novita saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI meninjau Titik Nol IKN Nusantara, Jembatan Pulau Balang dan Bendungan Sepaku Semoi, Kaltim, Senin (18/4).

Politisi Partai Gerindra ini lebih lanjut mengingatkan salah satu fokus yang wajib menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat adalah pada kebutuhan pembiayaan agar pembiayaan IKN Nusantara tidak didominasi oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Terkait hal itu, usul Novita, Pemerintah perlu mengutamakan peranan swasta, BUMN, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dilaksanakan secara multiyears. Dengan demikian, tandas Novita, melalui skema-skema tersebut

diharapkan dalam pembiayaan IKN tidak memberatkan APBN.

Selain itu, Novita mengapresiasi pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR guna mendukung kebutuhan air baku serta pengendalian banjir di kawasan IKN Nusantara

di Provinsi Kaltim dan ditargetkan sudah dapat diisi air *impounding* pada pertengahan tahun 2023. Novita meyakini, melalui bendungan tersebut dapat menyuplai kebutuhan air bersih untuk segenap warga yang berada di dua kawasan yaitu wilayah Kota Balikpapan dan secara khusus kawasan IKN Nusantara.

“Konstruksi Bendungan Sepaku Semoi hingga pertengahan April 2022 sudah mencapai progress sebesar 45 persen. Bendungan ini memiliki luas genangan 280 hektare dan kapasitas tampung 10,6 juta m<sup>3</sup> untuk penyediaan air baku berkapasitas 2.500 liter per detik terdiri dari 500 liter per detik untuk Balikpapan dan 2000 liter/detik untuk IKN Nusantara. Bendungan Sepaku Semoi ini akan menampung air hujan serta dikelola untuk menjadi air minum sebagai program utama untuk bisa segera beroperasi sehingga kebutuhan air yang ada di Balikpapan dan di IKN Nusantara khususnya bisa terpenuhi secara maksimal,” pungkas Wakil Ketua BURT DPR RI tersebut. ■ pun/sf

# I Nyoman Parta Dorong Upaya Afirmatif untuk Hidupkan Perekonomian Bali

**A**nggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta meminta pemerintah melakukan berbagai upaya afirmatif untuk menggerakkan perekonomian di Bali. Menurutnya, Bali berbeda dengan provinsi dan kabupaten lainnya, karena memutlakkan kehadiran wisatawan dalam menggerakkan perekonomiannya.

“Oleh karena itu harus ada afirmatif untuk Bali termasuk dalam hal ini karena BUMN yang punya banyak uang, mereka menggerakkan segala potensinya untuk mengadakan kegiatan

di Bali agar pariwisata segera pulih,” kata Nyoman di sela-sela mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali, Senin (18/4).

Politisi PDI-Perjuangan itu meminta BUMN melibatkan para pengusaha lokal saat membuat atau menggelar kegiatan di Pulau Dewata, baik sebagai *event organizer* (EO) maupun sebagai pelaksana kegiatan. “Termasuk juga melibatkan para UMKM, jangan semuanya bawa dari Jakarta,” usul Nyoman.

Selain itu, Nyoman juga meminta sejumlah perusahaan BUMN, dalam hal ini PT Angkasa Pura dan maskapai Garuda Indonesia untuk mempersiapkan atau menambah jumlah penerbangan ke Bali. Menurutnya, saat ini Garuda Indonesia hanya beroperasi empat kali dalam sehari dan itu menurutnya tidak cukup,

Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta. Foto: Eki/Invi

apalagi ketika menyambut libur Idulfitri 2022 nanti.

Nyoman juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan menunda rencana kenaikan harga BBM Peralite dan gas elpiji 3 kilogram. Menurutnya, perekonomian saat ini masih belum pulih apalagi setelah kenaikan harga minyak goreng. “Terutama sekali UMKM kita, kita tahu UMKM kita menyerap tenaga kerja yang begitu banyak, oleh karena itu jangan naikkan dulu atau tunda dulu kenaikan Peralite dan gas elpiji,” ujar Nyoman.

Ia juga menyoroti adanya stok Peralite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang kerap habis. Menurutnya, ada dua kemungkinan yang menyebabkan hal itu. “Pertama, saya khawatir memang jumlahnya dikurangi yang kedua ada migrasi dari mobil mewah yang tadinya menggunakan Pertamina ke Peralite. Oleh karena itu harus ditegaskan bahwa mobil mewah itu harus menggunakan Pertamina,” papar Nyoman.

Terakhir, Nyoman meminta pemerintah menyederhanakan administrasi bagi nelayan, petani dan para penyosoh gabah dalam memperoleh BBM jenis solar. “Cukup rekomendasi lurah atau kepala desa saja mereka seharusnya sudah bisa mengambil BBM,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Bali tersebut.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Direksi Utama PT Pertamina (Persero), Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Direksi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero). ■ eki/sf



# Anggota DPR Apresiasi PLN Atas Program Kelistrikan di Papua

**M**emasok aliran listrik di daerah terdepan, terpencil dan terluar (3T) termasuk di wilayah Papua tidaklah mudah. Hal tersebut dikarenakan adanya tantangan geografis dalam membangun jaringan (grid) dari pembangkit ke saluran tegangan rendah di rumah tangga. Ditambah lagi permukiman penduduk tersebar di daerah pedalaman, pegunungan serta kepulauan.

Saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VII DPR RI meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Holtekamp 50MW di Jayapura, Anggota

Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph mengapresiasi upaya PT PLN (Persero) yang menghadirkan listrik ke rumah-rumah di Papua secara merata.

“Kami menyampaikan penghargaan kepada PLN yang begitu gigih memprogramkan pembangunan listrik di tanah Papua. Ini menjadi satu perhatian kami juga, dengan satu harapan, pasokan listrik bisa merata di seluruh daerah desa di tanah Papua,” ujar Willy di PLTMG Holtekamp 50MW Jayapura, Papua, Sabtu (23/4).

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, ketika nanti sudah ada pemekaran wilayah atau provinsi baru

di Pulau Papua, PLN harus sedini mungkin menyiapkan sumber energi listrik. Dengan begitu pembangunan yang akan dilakukan di tiga provinsi pemekaran tersebut tidak terhambat.

Di sisi lain, Willy mengungkapkan bahwa tingkat elektrifikasi listrik di Papua saat ini hampir mencapai 99 persen. Namun, baginya angka tersebut bukan menjadi suatu patokan yang membanggakan. “Elektrifikasi yang diharapkan masyarakat itu adalah kehadiran PLN langsung di rumah tangga masyarakat yang ada di desa maupun kecamatan dan kabupaten,” tutur legislator dapil Kalteng itu.

Bagi Willy, meninjau PLTMG Holtekamp 50MW sangatlah berarti untuk memastikan masyarakat di tanah Papua ini menikmati listrik dari negara (PT PLN). “Kita juga mendapati pembangunan pembangkit listrik baik PLTU, PLTS, PLTA yang ada di Papua ini sumber tenaganya cukup memadai. Apalagi nanti kita mendapat tantangan terkait energi baru terbarukan. Saya yakin sumber bahan baku atau penggerak selain tenaga fosil di sini sudah cukup melimpah,” pungkasnya. ■ es



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan jajaran direksi PLN di Jayapura. Foto: Erman/nvl

# Program Kesejahteraan Sosial Harus Perhatikan Kondisi Geografis Daerah



Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina saat mengikuti penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kepri. Foto: Arief/rvi

**A**nggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai penyaluran program kesejahteraan sosial di Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa disamaratakan dengan program yang berada di Pulau Jawa maupun daerah lainnya. Menurutnya fokus program kesejahteraan sosial yang dijalankan Kementerian Sosial juga harus memperhatikan kondisi geografis kedaerahan di masing-masing wilayah, karena Indonesia merupakan daerah kepulauan.

“Kita dibukakan mata bahwa Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi yang mempunyai wilayah yang berbatasan langsung dengan Vietnam, mereka mempunyai masyarakat yang sangat terpencil, fasilitas dan

sarpras untuk urusan keagamaan dan pendidikan serta fasilitas kesejahteraan belum mumpuni. Tentu ini menjadi perhatian dari Komisi VIII DPR RI agar fokus pembangunan bisa merata kepada mereka,” kata Selly usai mengikuti penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kepri bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dan Wali Kota Batam, di Batam, Kepri, Selasa (19/4).

Politisi PDI-Perjuangan itu menerangkan, implementasi program kegiatan sosial bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Batam banyak yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dikonsepsikan oleh pemerintah, terutama Kemensos. Temuan di lapangan, yang seharusnya anak-anak tingkat sekolah dasar (SD) menerima bantuan sebesar

Rp900.000, tetapi implementasinya mereka tidak menerima. Bahkan peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dari program keluarga harapan (PKH) juga tidak menerima BPNT.

“Masyarakat yang seharusnya menerima PKH otomatis mereka menerima BPNT, ternyata selama ini dari mulai awal mereka menerima PKH mereka tidak menerima BPNT. Artinya pertanyaan kami ke mana program itu, padahal program itu cair ini yang menjadi perhatian dari kami yang harus kami sampaikan kepada Kementerian Sosial agar evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat daerah harus betul-betul diperketat dan diperhatikan dengan matang,” tandas legislator dapil Jawa Barat VIII itu. ■ afr/sf

# Ade Rezki Minta BBPOM Pekanbaru Gencar Awasi Produk Pangan

Anggota Komisi IX DPR RI  
Ade Rezki Pratama.  
Foto: Jaka/nvi

**A**nggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama meminta, agar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru semakin gencar mengawasi keamanan pangan takjil, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.

“Oleh karena itu dalam rangka menjalankan bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri, kita berharap seluruh *stakeholder* tidak hanya BPOM, tapi juga Pemprov Riau serta pihak aparat Kepolisian untuk semakin gencar memagari dan memberikan proteksi yang lebih kepada masyarakat terhadap bahan-bahan mencurigakan yang tidak sesuai izin edar dan peruntukannya,” ujar Ade saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI mengunjungi BBPOM Pekanbaru di Provinsi Riau, Senin (18/4).

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan, program pengawasan yang telah berjalan ini patut diapresiasi, namun perlu melihat dalam jangka waktu kedepan program yang sifatnya mengajak atau mengkampanyekan masyarakat supaya lebih cerdas dan peduli sebelum mengonsumsi pangan maupun obat-obatan.

“Karena menurut saya, sosialisasi tentang edukasi masyarakat agar cerdas dan peduli terhadap konsumsi pangan dan obat-obatan tidak cukup hanya satu atau dua kali saja. Tetapi, harus secara simultan dan terus

menerus tetap gencar terhadap kampanye-kampanye peduli dalam melihat dan membaca sebelum mengonsumsi barang-barang produk makanan,” pungkas Ade.

Selain itu, Ade menjelaskan, Riau adalah wilayah yang strategis berada di segitiga emas antara Singapura dan Malaysia. Namun, pihaknya mengingatkan kewaspadaan yang perlu ditingkatkan terus-menerus terkait peredaran dan distribusi dari bahan-bahan makanan, pangan, vitamin dan obat-obatan yang masuk ke Tanah Air melalui pelabuhan besar maupun kecil di wilayah Riau.

“Oleh karena itu, kita banyak menemukan produk-produk yang begitu masif dari negara tetangga, baik itu dari Malaysia, Singapura dan bahkan produk dari Thailand Selatan yang masuk ke Provinsi Riau. Mudah-mudahan yang sudah terdistribusikan produk-produk yang sudah memiliki izin edar dan melalui mekanisme prosedural impor

yang sesuai dengan aturan main,” harap legislator dapil Sumatera Barat II ini.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BBPOM Pekanbaru Yosef Dwi Irwan mengatakan, temuan pangan yang memiliki zat berbahaya di Provinsi Riau tahun ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2021, itupun yang ditemukan bahan berbahaya boraks dan zat pewarna tekstil rhodamin. “Walaupun temuannya menurun, tetapi kami tetap waspada terus dengan juga membekali para kader penyuluh di lapangan,” terangnya.

Selain itu, Yosef mengusulkan agar untuk daerah-daerah perbatasan ada izin edar khusus yang berlaku hanya untuk daerah tersebut dan tidak boleh keluar dari daerah itu. “Tetap nanti akan dikenakan pajak dan dikenakan *negative risk*, apabila sekali ketemu bahan pangan atau obat-obatan mengandung zat berbahaya maka importirnya bisa langsung di-*blacklist*,” tandas Yosef. ■ jk/sf





# Komisi X Apresiasi Pengembangan SMKN 6 Yogyakarta Berbasis Industri



Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau kegiatan belajar mengajar di SMKN 6 Yogyakarta. Foto: Andri/nvl

**A**nggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengapresiasi SMK Negeri 6 Yogyakarta sebagai salah satu sekolah yang sukses melaksanakan Program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK). Ledia mengatakan, program SMK PK memberikan perubahan pada proses pembelajaran yang semakin *link and match* dengan dunia industri. Manfaat yang dirasakan adanya perubahan pola pikir dari guru, karyawan, siswa, serta orang tua dalam memahami serta menjalankan visi dan misi sekolah.

“Perubahan yang sangat signifikan dari program SMK PK juga terdapat dalam hal penyusunan kurikulum bersama industri, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM guru, tersedianya sarana prasarana *advance workshop* standar industri,” kata Ledia saat mengikuti kunjungan

”

**PERUBAHAN YANG SANGAT SIGNIFIKAN DARI PROGRAM SMK PK JUGA TERDAPAT DALAM HAL PENYUSUNAN KURIKULUM BERSAMA INDUSTRI, PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM GURU**

kerja reses Komisi X DPR RI meninjau kegiatan belajar mengajar (KBM) di SMK Negeri 6 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (18/4).

Lebih lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan kemitraan yang dibangun dengan

industri sangat baik serta peran *leader* (kepala sekolah) menjadi kunci kesuksesan SMKN 6 Yogyakarta untuk mendapatkan kepercayaan dari industri. Menurut Ledia, meyakinkan industri untuk bekerja sama hingga mau berkomitmen tidaklah mudah.

Sekolah yang memiliki fokus keahlian di bidang *hospitality* tersebut kini memiliki beragam bentuk kemitraan. Ledia menjelaskan, yang menjadi praktik baik kemitraan antara SMK dengan industri adalah terbentuknya kelas-kelas industri di setiap kompetensi. Tercatat SMKN 6 Yogyakarta memiliki empat kelas industri.

“Kita diperlihatkan beberapa kelas *industry*, di antaranya perhotelan dan kuliner. Kelas industri ini bertujuan menyiapkan lulusan yang siap bekerja dan dibutuhkan oleh perusahaan, karena melalui kurikulum yang berbasis industri hingga tenaga pengajar ahli disiapkan oleh industri,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I itu.

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira turut mengapresiasi SMKN 6 Yogyakarta yang mempunyai beberapa program kekhususan seperti kuliner, dan berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang menunjang siswa dan siswi ini untuk bisa melanjutkan ke dunia kerja nanti. Dengan menyiapkan sarana dan prasarananya, Andreas yakin sekolah ini bisa menjadi contoh SMK yang bagus untuk Indonesia.

“Setelah kami bicara dengan kepala sekolah dan gurunya, SMK ini dikembangkan dengan model Badan Layanan Umum Daerah. Jadi mereka memperoleh dukungan pemerintah, tapi juga mereka hidup dan berkembang dengan kemampuan yang mereka kelola dari hasil yang mereka kelola. Misalnya mereka membuat kue, pakaian, tata boga kuliner dan itu kemudian dijual, dan dipesan oleh masyarakat. Dari hasil itu, anak-anak memperoleh bagiannya dan sekolah bisa menjual itu untuk menunjang kegiatan sekolahnya,” pujiannya. ■ man/sf

**S**ejak tahun 2020 hingga 15 April 2022, Bea Cukai Batam mencatat telah melakukan 1.144 tindakan penindakan yang diantaranya terkait peredaran rokok ilegal, minuman beralkohol, dan narkoba. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai diperlukan upaya peningkatan pengawasan dan penindakan dalam rangka memperketat pengawasan di wilayah perbatasan.

“Upaya pengawasan dan penindakan perlu digiatkan untuk mencegah pelanggaran hukum dan hilangnya potensi penerimaan negara di sektor kepabeanan. Apalagi mengingat posisi Kepulauan Riau yang sangat strategis karena berada di jalur perairan internasional yang sibuk dan berhadapan langsung negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia,” kata Puteri saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (18/4).

Hal itu menurut Puteri merupakan tugas Bea Cukai Batam sebagai *community protector* yang dibuktikan melalui serangkaian penindakan atas pelanggaran kepabeanan dan cukai. Dalam hal ini, Puteri

# Puteri Komarudin: Perketat Pengawasan Bea Cukai di Wilayah Perbatasan

juga mendorong Bea Cukai Batam untuk mengoptimalkan peran Batam Logistics Ecosystem (BLE) untuk tingkatkan penerimaan negara. Hal itu diutarakannya menyikapi keberhasilan penerimaan Bea Cukai Batam yang mencapai Rp221,99 miliar atau sekitar 213,95 persen dari target pada triwulan I-2022.

“Pengembangan BLE tentu bermanfaat untuk penyederhanaan proses bisnis dan layanan, kolaborasi sistem layanan dan logistik, serta kemudahan setiap transaksi pembayaran ke penerimaan negara. Dengan begitu, harapannya, Bea Cukai Batam bisa mengejar target penerimaan tahun 2022, atau bahkan bisa melebihinya,” tegas Puteri pada

kunjungan kerja reses yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir tersebut.

Lebih lanjut, Puteri turut mempertanyakan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 tahun 2019 yang diantaranya mengatur penyesuaian ambang batas nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman dari 75 dollar AS menjadi 3 dollar AS. “Pada kunker sebelumnya, banyak pelaku usaha *online* di Batam yang mengaku keberatan atas ketentuan ini karena membuat harga produk menjadi mahal dan berdampak pada penurunan penjualan. Karenanya, saya ingin mengetahui seperti apa pelaksanaan PMK ini,” tuturnya. ■ *srw/sf*



Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin saat foto bersama usai kunjungan kerja reses. Foto: Fitri/mvl



# Banggar Terima Rekomendasi Apeksi, Pertimbangkan Kembali Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah

**D**alam Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi

Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa apa yang menjadi catatan dan telah disampaikan oleh pihak Apkasi dan apeksi akan menjadi bahan masukan bagi Banggar untuk kemudian dapat dibahas dengan pemerintah pusat pada saat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Semangatnya sama seperti yang disampaikan. Sesungguhnya yang ingin dicapai itu, selain menyangkut tentang pertumbuhan dan investasi, yaitu kemandirian fiskalnya yang ingin kami coba bangun sedemikian rupa. Tentu kami sadari bersama ada kesepakatan kami dengan pemerintah, ketika itu di Komisi XI bahwa ketentuan mandatori dan sebagainya itu setidaknya-tidaknya akan kami lakukan dalam jangka 10 sampai 15 tahun,”

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.  
Foto: Jaka/mvl

kata Said saat rapat berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).

Sebelumnya, perwakilan Apeksi sempat menyampaikan bahwa dengan memperhatikan catatan dan dampak positif dan negatif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Apeksi merekomendasikan, antara lain pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali untuk ketentuan pajak dan Retribusi Daerah potensi menghilangkan atau mengurangi PAD yang tidak sesuai dengan semangat disusunnya undang-undang ini.

Apeksi juga merekomendasikan agar pemerintah pusat segera menerbitkan aturan teknis, mengingat akibat dari undang-undang ini daerah harus merubah atau mengganti Perda yang memakan waktu cukup lama, ditambah harus melalui tahapan evaluasi Raperda oleh pemerintah pusat. Sementara pelaku usaha dan masyarakat sangat menantikan kepastian hukum. Termasuk aturan teknis mengenai Dana Bagi Hasil dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perusahaan dan Cukai Tembakau.

Apeksi meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali Anggaran Wajib Belanja Pegawai 30 persen dan Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik 40 persen sehingga daerah dapat menerapkan prinsip otonomi dengan semestinya. Jika ketentuannya masih sama, Belanja Pegawai 30 persen dan Anggaran Infrastruktur 40 persen maka penerapannya secara bertahap dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Selain itu Apeksi juga merekomendasikan agar pemerintah pusat mempertimbangkan Dana Kelurahan sebagai bagian dari Dana Transfer Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik. ■

dep/aha

# Jadi Satgas IPU Atasi Konflik Rusia-Ukraina, Fadli Zon Dorong Langkah Diplomasi

**D**PR RI kembali ikut ambil bagian dalam upaya perdamaian bagi konflik Rusia-Ukraina melalui keterlibatan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dalam Satuan Tugas Organisasi Parlemen Dunia/Inter-Parliamentary Union (IPU) Task Force. Satgas ini dibentuk atas dorongan serta inisiatif BKSAP DPR RI dalam perhelatan Sidang Umum IPU ke-144 di Nusa Dua pada akhir Maret lalu.

“Dalam pertemuan pertama IPU Task Force tanggal 25 April 2022 kemarin, saya mendesak agar perwakilan parlemen dunia segera melakukan langkah-langkah diplomasi konkret untuk mencegah peperangan mencapai eskalasi yang tidak diinginkan,” jelas Fadli dalam keterangan pers yang diterima

**Parlementaria**, Kamis (28/4).

Satgas IPU beranggotakan delapan orang yang mewakili enam Grup Geopolitik, yaitu Afrika Selatan dan Namibia sebagai wakil Grup Afrika, Uni Emirat Arab mewakili Grup Arab, Indonesia mewakili Grup Asia Pasifik, Kazakhstan mewakili Grup Eurasia, Uruguay sebagai wakil untuk Grup Amerika Latin dan Karibia, serta Belanda dan Israel sebagai wakil Grup Twelve Plus yang meliputi wilayah Eropa Barat.

Pada pertemuan pertama yang dilakukan secara virtual tersebut terdapat beberapa agenda antara lain; pembentukan organisasi kerja, rencana agenda kerja termasuk rencana kunjungan, dan jadwal pertemuan hingga aspek-aspek lain yang akan mendukung kerja Satgas. Menurut



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto: Ist/nvl

Fadli, hasil kerja Satgas IPU nantinya menjadi ujian bagi efektivitas diplomasi parlemen sebagai bagian dari diplomasi total.

Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR RI tersebut menyatakan bahwa agar berfungsi dengan baik, Satgas IPU harus bisa mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak, yaitu Rusia dan Ukraina, sehingga pembicaraan tripartit antara Satgas IPU, Parlemen Rusia, dan Parlemen Ukraina bisa menghasilkan kesepakatan yang berarti.

“Kita tentunya berharap agar langkah diplomasi Organisasi Parlemen Dunia ini bisa menjadi bagian signifikan dari upaya mencapai penyelesaian politik tersebut. Jangan sampai konflik tersebut menjerumuskan kita pada dua bencana yang sangat tidak diharapkan tadi, yaitu Perang Dunia III dan Perang Nuklir,” tandas Anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Dalam gelaran Sidang Majelis IPU ke-44, BKSAP DPR RI sebagai delegasi parlemen RI mengusulkan resolusi damai atas konflik di Ukraina. Pada kesempatan tersebut kemudian disepakati resolusi berjudul “Peaceful Resolution of the War in Ukraine, Respecting International Law, the Charter of the United Nations and Territorial Integrity” yang merupakan komitmen parlemen dunia untuk terlibat langsung dalam mendorong penyelesaian damai antara Rusia dengan Ukraina.

Sebagai pengusul terbentuknya Satgas, Fadli yang merupakan anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat V ini juga menekankan bahwa Satgas IPU harus bersifat imparial dan netral agar dapat bekerja secara objektif untuk mengakhiri perang, de-eskalasi konflik, membuka koridor kemanusiaan, serta tercapainya kesepakatan damai. ■ uc/sf

# RUU PPP Solusi Atasi Obesitas dan Tumpang Tindih Regulasi

**R**evisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) kelak dipercaya bisa mengatasi obesitas dan tumpang tindih regulasi. Mengingat saat ini ada 42.996 regulasi. Dengan rincian, peraturan pusat sebanyak 8.414 regulasi, peraturan menteri 14.453 regulasi, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian 4.164 regulasi, dan peraturan daerah 15.965 regulasi.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI diketahui telah menyetujui revisi tersebut beberapa waktu lalu. Dalam siaran pers yang diperoleh Parlemen, Anggota Baleg DPR Heri Gunawan, Jumat (22/4), mengatakan, salah satu yang sudah dilakukan Baleg dalam mengatasi obesitas dan tumpang tindih itu adalah dengan menggunakan metode *omnibus law*. Baleg juga merencanakan RUU Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU RPPSK) dirumuskan dengan metoda omnibus law.

“Namun, metode *omnibus law* belum memiliki landasan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bahwa metode omnibus law dinyatakan tidak memiliki dasar hukum. Karena itu, perlu merevisi UU PPP untuk mengakomodir metode *omnibus law*,” jelas Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan. Selain itu, revisi UU PPP juga perlu mengakomodasi revisi penulisan pasca pengesahan UU oleh DPR dan Pemerintah, serta partisipasi masyarakat juga harus diperkuat.

Kapoksi fraksi Partai Gerindra di Baleg DPR RI itu melanjutkan, sebagai tindak lanjut Putusan MK itu, Baleg DPR berinisiatif mengusulkan RUU

Perubahan Kedua atas UU NO.12/2011 tentang PPP dalam Prolegnas Prioritas 2022. Dan pada Rapat Paripurna DPR Selasa lalu (8/2), RUU PPP sudah disahkan menjadi usul iniatif DPR. “Inisiatif DPR disambut baik oleh Pemerintah yang dengan cepat mengirim Surat Presiden beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sehingga Pembicaraan Tingkat I dapat segera dilaksanakan,” ungkapnya.

Selain metode *omnibus law*, beberapa substansi penting dalam RUU PPP, sambung Wakil Ketua F-Gerindra DPR ini, adalah penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat (Pasal 96), perbaikan kesalahan teknis penulisan oleh DPR (Pasal 72), dan

perbaikan kesalahan teknis penulisan oleh Pemerintah (Pasal 73), serta pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbasis elektronik (Pasal 97B).

“Selain itu, juga disepakati mengenai penyempurnaan penjelasan terhadap asas keterbukaan pada penjelasan Pasal 5 huruf g. Hal tersebut untuk mendukung penguatan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan memberi masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan,” papar Hergun. ■ mh/aha



**METODE OMNIBUS LAW BELUM MEMILIKI LANDASAN HUKUM. HAL TERSEBUT SESUAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020**



Anggota Baleg DPR RI Heri Gunawan. Foto: Arief/nvl

# Setjen DPR Lepas Tujuh Pegawai Masuki Masa Purnabakti



Sekjen DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai melepas ketujuh pegawai Setjen DPR RI yang memasuki masa purnabakti. Foto: Jaka/nvl

**T**ujuh pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memasuki masa pensiun yang selama ini telah mengabdikan hingga memasuki masa purnabakti terhitung mulai 1 April dan Mei 2022. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar didampingi Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Kepala Badan Keahlian Inosentius Samsul, Inspektur Utama Setyanta Nugraha, dan Plt. Deputi Bidang Persidangan Suprihatini beserta jajaran pejabat Setjen DPR RI melepas ketujuh pegawai yang memasuki masa purnabakti tersebut.

Ketujuh pegawai Setjen DPR RI yang memasuki masa pensiun itu yakni Isnu Purwanto (Perisalah Legislatif Ahli Madya), Ambarwati Martini (Bagian Sekretariat Muspim), A. Suwarna (Bagian Tata Usaha Pimpinan Setjen), Masdar (Bagian Pengelola Rumah Jabatan), Susena (Bagian Administrasi Badan Keahlian), Totok Sugiono (Bagian Gedung dan Instalasi), dan Warsi (Bagian Sekretariat Komisi I).

“Ini adalah cara kami memberikan satu penghargaan buat para pensiunan. Setiap ada yang pensiun, kami lepas setiap bulan. Jadi mereka tentu adalah orang-orang yang selama ini memberikan dedikasi terbaiknya bagi kedinasan, bagi kantor. Kami juga lepas dengan cara yang terhormat. Karena mereka menjadi satu keluarga besar yang selama ini sudah mencurahkan tenaga pikirannya bagi negara, bagi kantor,” ucap Indra di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/5).

Indra berharap tujuh pegawai yang memasuki masa pensiun ini tetap menjaga silaturahmi meskipun tidak lagi bekerja di lingkungan Setjen DPR RI. “Tentu kami berharap lebih banyak waktu bagi keluarga, bersilaturahmi dengan lingkungan, dan tentunya silaturahmi dengan kedinasan tetap terjaga karena ini penting untuk terus menjaga semangat untuk tetap sehat setelah purna bakti, sehingga saya kira silaturahmi itu menjadi suatu yang penting untuk selalu dilakukan,” ucap Indra lebih lanjut.

Indra menambahkan mengenai kekosongan jabatan tujuh pegawai yang semuanya merupakan jabatan fungsional itu, tidak akan mengganggu roda organisasi namun tetap akan segera diisi kembali. “Sesegera mungkin nanti melakukan kembali *inpassing* untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut. Karena walaupun organisasi tidak akan berpengaruh, tentu kami berharap yang memasuki masa pensiun ini nanti bisa diisi kembali untuk memperkuat lini-lini yang ada,” tutup Indra.

Isnu Purwanto, perwakilan dari tujuh pegawai yang dilepas hari ini mengatakan dirinya tersanjung dengan adanya acara pelepasan ini. “Harapan saya ya, untuk kebijakan untuk pelepasan bulan ini baik. Saya tersanjung. Saya dulu diterima oleh staf sekarang dilepas oleh Sekjen langsung berikut dengan jajarannya. Semoga kebijakan ini terus berlangsung. Saya juga berharap untuk kami-kami ini, semoga diberi kesehatan yang prima dan berinteraksi serta mengabdikan untuk masyarakat,” ucap Isnu. ■ gal/sf

# BURT DPR Dorong Peningkatan Pelayanan RS Mayapada BMC Bogor

**W**akil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI H.A. Bakri mengapresiasi layanan dan fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit Mayapada BMC Kota Bogor, sebagai salah satu rumah sakit *provider* PT Asuransi Jasindo dalam program pelaksanaan Jamkestama. Hal itu ia sampaikan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan manajemen RS Mayapada BMC Bogor.

Dalam pertemuan itu, meskipun Bakri menilainya baik, ia mengatakan pelayanan harus terus ditingkatkan. Dimana mengingat Anggota DPR RI merupakan peserta Jamkestama VVIP yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal.

“Tadi dipaparkan oleh ibu dirut, kami melihat pelayanan rumah sakit cukup bagus dan fasilitas cukup baik, dan kami berharap pelayanan ini bisa ditingkatkan. tidak ada kendala yang signifikan karena komunikasi yang

baik antara Jasindo dengan rumah sakit beserta kawan-kawan di DPR RI tetapi saya berharap kedepan dapat ditingkatkan pelayanan lebih diutamakan,” tutur Bakri dalam pertemuan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (6/5).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan pelayanan kesehatan yang optimal dari rumah sakit *provider* tentunya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan para anggota dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan dan juga untuk kesehatan para keluarganya.

“Saya juga mengimbau kawan-kawan di DPR RI bisa memaksimalkan kerjasama Jamkestama ini dalam rangka menjaga kesehatan tentunya melindungi keluarga dari berbagai macam penyakit,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyebutkan, kunjungan kerja BURT DPR RI ini menjadi salah tugas rutin dalam upaya pengawasan pelaksanaan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. ■ pdt/aha



Wakil Ketua BURT DPR RI H.A. Bakri saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan manajemen RS Mayapada BMC Bogor. Foto: Prima/nvl



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI  
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**MENGUCAPKAN :**

# Selamat Hari Raya Waisak

